

Mengintegrasikan Dakwah Budaya dan Struktural dalam Pengembangan Masyarakat: Kerangka Transdisipliner untuk Transformasi Sosial Islam

Integrating Cultural and Structural Da'wah in Community Development: A Transdisciplinary Framework for Islamic Social Transformation

Adelia Mustika Putri Suwarno

Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Email: adeliamustikaputri21@gmail.com

Salsabilla Zahwa Naura

Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Email: adeliamustikaputri21@gmail.com

Adelia Tria Lestari

Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Email: adeliamustikaputri21@gmail.com

Ali Hasan Siswanto

Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Email: alihan_siswanto@uinkhas.ac.id

Article Info

Received : 30 September 2025
Revised : 15 October 2025
Accepted : 28 October 2025
Published : 31 October 2025

Keywords: integration of da'wah, community development, Islamic social transformation, transdisciplinary framework

Kata kunci: integrasi dakwah, pengembangan masyarakat, transformasi sosial Islam, kerangka transdisipliner

Abstract

This study addresses the epistemological fragmentation between cultural and structural da'wah that undermines the transformative mission of Islamic propagation in contemporary Muslim societies. The main research question explores how cultural values, institutional structures, and community empowerment can be integrated into a transdisciplinary framework for sustainable Islamic social transformation. Using a qualitative exploratory design grounded in a constructivist paradigm, the study employs a transdisciplinary approach that merges community development theory, Islamic communication, and public policy analysis. Data were gathered through literature mapping of Scopus-indexed publications, document analysis of Islamic development programs, and expert interviews with da'wah scholars and practitioners. The findings indicate that the dichotomy between cultural and structural da'wah has weakened the link between spiritual values and

institutional policies. Through a community development approach, da'wah can shift from a normative religious activity to a transformative social movement. The study introduces the Integrative Da'wah Framework, which bridges local wisdom, institutional support, and digital engagement, providing a novel epistemological basis for reconstructing Islamic social sciences and promoting participatory, inclusive social policies in the digital era.

Abstrak

Penelitian ini membahas fragmentasi epistemologis antara dakwah kultural dan dakwah struktural yang melemahkan peran transformasi dakwah Islam dalam masyarakat Muslim kontemporer. Pertanyaan utama penelitian ini adalah bagaimana nilai-nilai budaya, struktur kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat dapat diintegrasikan ke dalam kerangka transdisipliner untuk mewujudkan transformasi sosial Islam yang berkelanjutan. Dengan desain penelitian kualitatif eksploratif berbasis paradigma konstruktivis, studi ini menggabungkan teori pengembangan masyarakat, komunikasi Islam, dan analisis kebijakan publik. Data diperoleh melalui pemetaan literatur terindeks Scopus, analisis dokumen program pengembangan Islam, serta wawancara dengan pakar dan praktisi dakwah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dikotomi antara dakwah kultural dan struktural telah menyebabkan terputusnya nilai spiritual dan kebijakan kelembagaan. Melalui pendekatan pengembangan masyarakat, dakwah dapat berkembang dari aktivitas normatif menjadi gerakan sosial transformatif. Penelitian ini menawarkan Integrative Da'wah Framework yang menyatukan kearifan lokal, dukungan kelembagaan, dan keterlibatan digital, sekaligus memberikan landasan epistemologis baru bagi rekonstruksi ilmu sosial Islam yang partisipatif dan inklusif di era digital.

How to cite: Adelia Mustika Putri Suwarno, Salsabilla Zahwa Naura, Adelia Tria Lestari, Ali Hasan Siswanto, " Mengintegrasikan Dakwah Budaya dan Struktural dalam Pengembangan Masyarakat: Kerangka Transdisipliner untuk Transformasi Sosial Islam", DIRASAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 4 (2025): 504-521. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>.

Copyright: @2025, Adelia Mustika Putri Suwarno, Salsabilla Zahwa Naura, Adelia Tria Lestari, Ali Hasan Siswanto



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Dunia dakwah Islam hari ini menghadapi perubahan sosial yang cepat dan kompleks. Perkembangan digital, urbanisasi, dan fragmentasi sosial telah mengguncang cara umat beragama berinteraksi, memahami nilai, dan menjalankan misi dakwah. Studi oleh Muttaqin & Arifah (Muttaqin & Arifah, 2025) menunjukkan bahwa digitalisasi dakwah memperluas jangkauan pesan keislaman, tetapi juga menimbulkan polarisasi ideologi dan krisis otoritas keagamaan. Fenomena ini melahirkan kontroversi antara kelompok yang menekankan dakwah kultural yang humanis dan dialogis dan mereka yang menonjolkan dakwah

struktural yang politis dan kelembagaan. Di tengah perubahan tersebut, muncul kebutuhan mendesak (emergency) untuk menemukan paradigma dakwah yang mampu menyeimbangkan nilai spiritual, sosial, dan kebijakan publik agar Islam tetap hadir sebagai kekuatan transformasi sosial, bukan sekadar simbol retorik.

Literatur ilmiah dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa dakwah kultural dan struktural masih terjebak dalam dikotomi metodologis. Dakwah kultural sering dipuji karena kepekaannya terhadap kearifan lokal, namun dikritik karena kurang berdampak pada perubahan sistemik; sebaliknya, dakwah struktural dianggap kuat secara kelembagaan, tetapi dingin terhadap dinamika sosial akar rumput. Zain et al. (Zain dkk., 2017) menegaskan perlunya integrasi nilai-nilai budaya dan struktur sosial agar dakwah mampu menjawab tantangan modernitas. Begitu pula Moh Irsyad Faahmni Me et al. (Mr dkk., 2024) menyoroti pentingnya *community-based Islamic development* yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dakwah, bukan objek. Fakta literatur ini memperlihatkan adanya kesenjangan teoretis dan praktis yang menuntut pendekatan baru: dakwah yang bukan hanya *preaching*, tetapi juga *empowering*.

Penelitian ini bertujuan merumuskan model konseptual dakwah integratif yang memadukan kekuatan pendekatan kultural dan struktural melalui kerangka *community development*. Pendekatan ini diyakini mampu menjawab krisis relevansi dakwah terhadap perubahan sosial modern yang semakin kompleks. Berdasarkan hasil kajian Ghozali & Annisa (2022), paradigma *community development* berpotensi menjadi jembatan antara dakwah normatif dan transformasi sosial, sebab ia berorientasi pada pemberdayaan, partisipasi, dan keberlanjutan. Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya ingin mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menegaskan arah baru dakwah Islam sebagai gerakan sosial yang membebaskan, memanusiakan, dan menyejahterakan.

Kebaruan utama penelitian ini terletak pada pengajuan *Transdisciplinary Da'wah Framework*, sebuah paradigma yang mengintegrasikan dakwah kultural, dakwah struktural, dan teori *community development* dalam satu kesatuan epistemologis. Pendekatan ini berangkat dari keyakinan bahwa persoalan umat tidak bisa dipecahkan hanya melalui ceramah atau kebijakan, melainkan melalui kerja sosial yang melibatkan komunitas sebagai agen perubahan. Penelitian oleh Zaini (Zaini, 2017) menunjukkan bahwa model dakwah berbasis pemberdayaan mampu meningkatkan *social resilience* dan *religious well-being* masyarakat Muslim urban. Demikian pula, Hanif dkk (Hanif dkk., 2025) menegaskan pentingnya integrasi nilai agama dan pembangunan sosial sebagai fondasi kebijakan Islam di era digital. Oleh karena itu, tulisan ini berargumen bahwa dakwah integratif berbasis *community development* bukan sekadar alternatif metodologis, tetapi merupakan rekonstruksi paradigma dakwah Islam menuju masa depan yang lebih humanis, partisipatif, dan berkeadilan sosial.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif eksploratori dengan desain transdisipliner, yang bertujuan menggali dan membangun pemahaman baru

tentang integrasi dakwah kultural-struktural melalui pendekatan community development dalam konteks transformasi sosial Islam di era digital. Pendekatan ini dipilih karena isu dakwah kontemporer bersifat kompleks dan multidimensional, mencakup dimensi nilai, struktur, dan praksis sosial yang tidak dapat dijelaskan melalui satu disiplin ilmu tunggal. Menurut Kristiansen (Kristiansen dkk., 2017), paradigma konstruktivis menempatkan peneliti sebagai ko-kreator makna bersama partisipan dalam konteks sosial mereka. Dengan demikian, pengetahuan yang dihasilkan bukanlah representasi objektif realitas, tetapi hasil interaksi interpretatif antara peneliti, informan, dan konteks budaya. Pendekatan transdisipliner ini juga sejalan dengan rekomendasi Pohl et al. (Pohl dkk., 2017) yang menekankan pentingnya menggabungkan sains sosial, humaniora, dan nilai spiritual dalam memahami fenomena sosial berbasis komunitas. Dengan demikian, metode kualitatif eksploratori berparadigma konstruktivis ini tidak hanya menghasilkan deskripsi fenomenologis, tetapi juga menuntun pada konstruksi konseptual baru dalam studi dakwah sebagai praksis sosial yang reflektif, partisipatif, dan transformatif.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan interpretif dengan desain studi kasus multikontekstual, mencakup lembaga pesantren, organisasi zakat, dan NGO Islam sebagai embedded sites dalam kerangka Integrative Da'wah Framework. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara mendalam bagaimana nilai-nilai kultural, struktur kelembagaan, dan praktik pemberdayaan masyarakat saling berinteraksi dalam konteks sosial-keagamaan yang berbeda. Flick (Flick, 2022) menegaskan bahwa kerangka interpretif memungkinkan analisis terhadap makna subjektif yang dikonstruksi oleh aktor sosial dalam ruang simbolik mereka. Dalam konteks Islam, Jauhari et al. (Jauhari dkk., 2023) menemukan bahwa pemaknaan terhadap dakwah digital dan sosial dipengaruhi oleh relasi kuasa, kebijakan publik, dan struktur budaya lokal. Prosedur penelitian mencakup *literature mapping* terhadap publikasi Scopus terkait dakwah, document analysis atas kebijakan lembaga keagamaan, serta semi-structured interviews dengan pakar dan praktisi dakwah. Analisis data dilakukan melalui thematic coding dan triangulasi sumber sesuai dengan prosedur Nowell et al. (Nowell dkk., 2017). Dengan desain interpretif dan studi kasus transdisipliner ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap model konseptual dakwah yang tidak hanya representatif terhadap realitas sosial umat, tetapi juga dapat dijadikan dasar bagi perumusan kebijakan dan praksis pemberdayaan keagamaan berbasis komunitas.

Penelitian ini diawali dengan studi literatur global yang melibatkan database bereputasi internasional seperti Scopus, Web of Science, dan Islamic Citation Index, guna memetakan tren epistemologis dan arah metodologis terbaru dalam penelitian tentang dakwah, pembangunan komunitas, dan transformasi sosial Islam. Pendekatan ini dipilih karena literatur global menawarkan gambaran menyeluruh mengenai integrasi teori sosial dan keagamaan dalam konteks digital dan kebijakan publik. Menurut Boell & Cecez-Kecmanovic, studi literatur sistematis bukan sekadar mengumpulkan referensi, tetapi berfungsi sebagai

analisis konseptual yang menegaskan posisi penelitian dalam lanskap pengetahuan global.

Dalam konteks dakwah, Adiyono et al. (Adiyono dkk., 2024) menegaskan pentingnya meta-analisis lintas database Islamik untuk memahami transformasi epistemologi dakwah kontemporer. Analisis dilakukan secara tematik terhadap dokumen kebijakan lembaga dakwah nasional seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama, serta proyek community development berbasis pesantren dan NGO seperti Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat. Dengan demikian, integrasi antara kajian literatur global dan analisis kebijakan domestik menghasilkan pemetaan konseptual yang solid, yang menjadi dasar bagi kerangka teoretis dan formulasi novelty penelitian ini.

Selain analisis literatur dan dokumen, penelitian ini mengimplementasikan wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan tiga kategori partisipan: tokoh dakwah, akademisi, dan aktivis sosial, untuk memperkaya dimensi empirik dan interpretatif dari model dakwah integratif. Pendekatan ini sesuai dengan paradigma konstruktivis yang menekankan makna subjektif dan pengalaman reflektif aktor sosial dalam membentuk wacana dan praktik dakwah. Sebagaimana dikemukakan oleh Diccico-Blom & Crabtree (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006) wawancara mendalam memungkinkan eksplorasi terhadap horizon makna partisipan, bukan sekadar pengumpulan data verbal.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara purposif terhadap 12 narasumber dengan latar belakang akademik dan praksis yang beragam, termasuk ulama pesantren, dosen komunikasi Islam, dan koordinator NGO keagamaan. Hasil wawancara kemudian dianalisis menggunakan content and thematic analysis sebagaimana direkomendasikan oleh Nowell et al. (Nowell dkk., 2017), serta diverifikasi melalui member checking dan peer debriefing untuk menjaga validitas dan kredibilitas data dari Lietz et al. (Lietz dkk., 2006a). Melalui triangulasi antara studi literatur global, analisis dokumen, dan wawancara mendalam, penelitian ini berhasil menghasilkan pemahaman transdisipliner yang tidak hanya menggambarkan praktik dakwah dan pemberdayaan, tetapi juga menawarkan model konseptual baru yang berorientasi pada kebijakan publik dan rekonstruksi sosial keagamaan di era digital.

Penelitian ini menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*) sebagaimana dirumuskan oleh Braun dan Clarke untuk mengidentifikasi pola tematik yang merepresentasikan integrasi antara dakwah kultural, dakwah struktural, dan pendekatan community development. Pendekatan ini dipilih karena analisis tematik memberikan fleksibilitas dalam menghubungkan data empiris dan konseptual, sekaligus memfasilitasi konstruksi makna baru dari hasil wawancara, dokumen kebijakan, dan studi literatur. Menurut Byrne (2022), analisis tematik menekankan proses coding, theme generation, dan theme refinement untuk membangun interpretasi yang koheren antara konteks sosial dan makna yang terkandung dalam data.

Dalam konteks dakwah, Shalihah & Soiman (Shaliha & Soiman, 2025) menunjukkan bahwa analisis tematik mampu mengungkap dinamika simbolik dan

nilai sosial dalam praktik dakwah digital dan komunitas. Proses analisis dalam penelitian ini meliputi enam tahapan utama: (1) familiarisasi data, (2) open coding, (3) pengelompokan tema awal, (4) pengujian hubungan antar-tema, (5) pembentukan tema integratif, dan (6) validasi melalui peer debriefing dan member checking. Dengan demikian, analisis tematik tidak hanya berfungsi sebagai alat klasifikasi data, tetapi juga sebagai kerangka epistemologis yang memungkinkan artikulasi teori dakwah integratif dalam konteks sosial yang kompleks dan multilevel.

Untuk memperkuat konsistensi konseptual dan validitas teoretis, penelitian ini menerapkan teknik pattern matching dengan membandingkan pola empiris hasil analisis tematik terhadap kerangka teoretis dakwah Islam dan teori pembangunan masyarakat. Pendekatan pattern matching relevan digunakan dalam studi eksploratif karena memungkinkan pengujian kesesuaian (fit) antara pola data lapangan dan ekspektasi teoritik yang diadaptasi dari literatur global. Hollweck (Hollweck, 2015) menjelaskan bahwa pattern matching memperkuat inferensi analitik dengan menghubungkan data empiris dengan proposisi teoritik. Dalam konteks ini, penelitian memetakan kesesuaian antara konsep tabligh-ta'dib-tazkiyah dalam teori dakwah (Irpan, 2022) dengan kerangka empowerment-participation-social capital dari teori pembangunan masyarakat (Nugrahani dkk., 2019). Analisis dilakukan melalui proses pattern convergence untuk menemukan tema lintas disiplin seperti social da'wah agency, faith-based empowerment, dan institutional resilience. Hasil pattern matching ini menghasilkan model konseptual "Integrative Da'wah Framework" yang menghubungkan spiritualitas, struktur sosial, dan kebijakan publik dalam satu matriks transdisipliner, sekaligus memperkuat landasan teoretis dakwah sebagai instrumen rekonstruksi sosial Islam yang partisipatif dan kontekstual.

Penelitian ini menerapkan triangulasi sumber (triangulation of sources) sebagai strategi utama untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas data dalam konteks penelitian kualitatif transdisipliner. Pendekatan ini digunakan karena isu dakwah dan pemberdayaan masyarakat bersifat multidimensional, melibatkan narasi keagamaan, kebijakan publik, dan praksis sosial, sehingga validitasnya hanya dapat diperoleh melalui perbandingan lintas sumber data. Menurut Flick (Flick, 2022), triangulasi sumber melibatkan konvergensi informasi dari berbagai tipe data wawancara, dokumen, dan observasi untuk menghasilkan interpretasi yang lebih kokoh. Dalam studi ini, triangulasi dilakukan melalui perbandingan antara hasil in-depth interviews dengan ulama, akademisi, dan aktivis; dokumen kebijakan lembaga dakwah (seperti MUI, BAZNAS, dan NGO Islam); serta publikasi ilmiah global yang terindeks Scopus/WoS. Temuan yang tumpang tindih dianalisis untuk mengidentifikasi pattern convergence dan thematic coherence sesuai rekomendasi Carter et al. (Carter dkk., 2014). Dengan demikian, triangulasi sumber berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme validasi, tetapi juga sebagai proses epistemologis yang memperkuat kredibilitas interpretasi data melalui verifikasi lintas konteks dan disiplin, sehingga hasil penelitian lebih dapat diandalkan secara ilmiah dan kontekstual.

Selain triangulasi, penelitian ini menggunakan teknik peer debriefing dan expert validation untuk memperkuat dimensi trustworthiness, khususnya aspek credibility dan confirmability dalam hasil penelitian. Teknik ini penting karena penelitian yang bersifat reflektif dan interpretatif rentan terhadap bias subjektif peneliti, sehingga membutuhkan mekanisme eksternal untuk menguji konsistensi dan ketepatan interpretasi. Lietz et al. (Lietz dkk., 2006b) menegaskan bahwa peer debriefing berfungsi sebagai proses audit kritis oleh rekan sejawat untuk menantang asumsi dan memvalidasi logika analitik. Dalam penelitian ini, proses peer debriefing dilakukan dengan melibatkan tiga akademisi ahli bidang dakwah, komunikasi sosial, dan studi kebijakan Islam dari universitas bereputasi di Indonesia dan Malaysia. Sementara expert validation dilakukan melalui konsultasi dengan dua pakar community development untuk menilai koherensi kerangka konseptual dan kepraktisan model dakwah integratif. Teknik validasi ini mengikuti prosedur Birt et al. (Birt dkk., 2016) yang menekankan participant validation dan theoretical alignment sebagai dasar kredibilitas. Melalui kombinasi peer debriefing dan expert validation, penelitian ini memastikan bahwa interpretasi dan temuan tidak hanya sah secara akademik, tetapi juga relevan dan aplikatif dalam pengembangan teori serta kebijakan dakwah berbasis komunitas di era digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

The Chronic Fragmentation of Da'wah Practices

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dakwah Islam di berbagai konteks sosial masih terjebak dalam dikotomi kronis antara dimensi kultural dan struktural. Fragmentasi ini muncul karena ketimpangan epistemologis antara orientasi moral-spiritual dakwah kultural dan pendekatan kelembagaan yang bersifat birokratis pada dakwah struktural. Studi lapangan terhadap pesantren, lembaga zakat, dan NGO Islam mengonfirmasi adanya jurang antara dakwah berbasis nilai (cultural-based preaching) dengan kebijakan sosial keagamaan yang diatur oleh negara atau lembaga formal (Aprilia Susilawati dkk., 2024). Fenomena ini menegaskan bahwa lembaga dakwah kerap gagal menjembatani spiritualitas lokal dengan agenda pembangunan sosial makro. Dengan demikian, realitas dakwah kontemporer menunjukkan keterpecahan fungsional yang menuntut integrasi teoretis dan metodologis agar dakwah kembali menjadi kekuatan sosial transformatif.

Toward a Transdisciplinary Understanding of Da'wah

Reinterpretasi hasil temuan menegaskan bahwa dakwah perlu dipahami ulang secara transdisipliner, melampaui batas komunikasi keagamaan menuju paradigma sosial yang inklusif. Pendekatan ini penting karena dakwah tidak hanya menyampaikan pesan moral, tetapi juga menggerakkan struktur sosial menuju tatanan keadilan dan partisipasi. Studi terkini menunjukkan bahwa reinterpretasi dakwah yang menggabungkan antropologi, sosiologi, dan studi kebijakan publik mampu menciptakan pola faith-based social engagement (Scholz dkk., 2024).

Melalui pendekatan ini, pesan dakwah tidak berhenti pada retorika spiritual, tetapi diterjemahkan menjadi tindakan nyata dalam pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, reinterpretasi dakwah menjadi langkah epistemologis penting untuk mengembalikan fungsi sosial Islam sebagai agen perubahan yang adaptif terhadap realitas global dan digital.

The Loss of Communal Context in Institutional Da'wah

Temuan lapangan memperlihatkan adanya dislocation yaitu keterputusan antara lembaga dakwah dan konteks sosial umat. Keterputusan ini muncul karena dakwah struktural cenderung berorientasi pada regulasi dan program administratif, bukan pada pemaknaan sosial masyarakat. Penelitian (Agusman dkk., 2023a) menemukan bahwa program dakwah pemerintah daerah di Indonesia sering gagal menjangkau komunitas marginal karena minimnya pendekatan partisipatif dan pemahaman terhadap kultur lokal. Demikian pula, lembaga zakat nasional sering kehilangan konteks pemberdayaan ketika fokus pada distribusi finansial semata tanpa membangun social capital (Makmur dkk., 2024a). Dislokasi ini menunjukkan bahwa tanpa pemulihan hubungan antara nilai budaya, struktur sosial, dan pengalaman komunitas, dakwah akan terus kehilangan relevansi sosial dan moralnya dalam masyarakat modern.

Deauthorization: The Weakening of Da'i as a Moral-Social Actor

Salah satu implikasi serius dari fragmentasi dakwah adalah deauthorization, yaitu melemahnya otoritas sosial dan moral para da'i di tengah masyarakat modern. Dalam era digital dan birokratisasi agama, otoritas keagamaan tidak lagi dimonopoli oleh lembaga formal, tetapi tersebar melalui media sosial dan jaringan komunitas. Menurut penelitian 'Ulyan ('Ulyan, 2023), munculnya digital da'wah influencers menyebabkan otoritas keagamaan bergeser dari ulama tradisional ke figur-figur populer yang belum tentu memiliki basis epistemik yang kuat. Sementara itu, lembaga dakwah formal justru mengalami delegitimasi karena dianggap tidak responsif terhadap kebutuhan sosial dan isu-isu kontemporer (Syamsurrijal dkk., 2022). Fenomena deauthorization ini menegaskan perlunya revitalisasi peran da'i sebagai moral-social mediator yang mampu menghubungkan nilai spiritual dengan problem sosial secara komunikatif dan partisipatif.

Lessons from Global Faith-Based Community Models

Dalam konteks global, berbagai penelitian memperlihatkan bahwa integrasi antara dakwah, pembangunan sosial, dan kebijakan publik telah berhasil dilakukan dalam model faith-based community development. Model ini relevan untuk dibandingkan karena menunjukkan bagaimana lembaga keagamaan dapat menjadi aktor pembangunan sosial yang kredibel. Studi di Inggris dan Malaysia memperlihatkan bahwa masjid dan lembaga zakat berhasil berperan sebagai pusat social inclusion dan community resilience melalui kolaborasi lintas sektor (Ismail dkk., 2024). Pendekatan ini menegaskan bahwa nilai-nilai keagamaan dapat menjadi sumber inovasi sosial dan ketahanan komunitas. Perbandingan ini

memberikan pelajaran penting bagi dunia Islam, bahwa integrasi dakwah dan pembangunan sosial memerlukan sinergi antara kultural, struktural, dan teknologi, bukan sekadar reformasi simbolik.

Reconstructing Integrative Da'wah

Berdasarkan temuan dan analisis di atas, penelitian ini merekomendasikan formulasi “Integrative Da'wah Framework” sebagai panduan aksi bagi revitalisasi dakwah di era digital. Rencana aksi ini menekankan perlunya transformasi epistemologis dari dakwah yang bersifat instruktif menjadi dakwah yang partisipatif, reflektif, dan berbasis komunitas. Implementasi dapat dimulai melalui tiga strategi: (1) Cultural grounding; penguatan basis budaya lokal dalam dakwah, (2) Structural synergy; kolaborasi antara lembaga keagamaan dan kebijakan publik, dan (3) Digital inclusion; pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses dan partisipasi masyarakat (Siregar, 2025). Dengan strategi ini, dakwah tidak hanya menjadi kegiatan ritual, tetapi juga kerangka transformasi sosial Islam yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus mengembalikan makna spiritual yang autentik dan inklusif.

3.2. Pembahasan

The Chronic Fragmentation of Da'wah Practices

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dakwah Islam di berbagai konteks sosial masih terjebak dalam dikotomi kronis antara dimensi kultural dan struktural. Fragmentasi ini muncul karena ketimpangan epistemologis antara orientasi moral-spiritual dakwah kultural dan pendekatan kelembagaan yang bersifat birokratis pada dakwah struktural. Studi lapangan terhadap pesantren, lembaga zakat, dan NGO Islam mengonfirmasi adanya jurang antara dakwah berbasis nilai (cultural-based preaching) dengan kebijakan sosial keagamaan yang diatur oleh negara atau lembaga formal (Octalia, 2020). Fenomena ini menegaskan bahwa lembaga dakwah kerap gagal menjembatani spiritualitas lokal dengan agenda pembangunan sosial makro. Dengan demikian, realitas dakwah kontemporer menunjukkan keterpecahan fungsional yang menuntut integrasi teoretis dan metodologis agar dakwah kembali menjadi kekuatan sosial transformatif.

Reinterpretasi hasil temuan menegaskan bahwa dakwah perlu dipahami ulang secara transdisipliner, melampaui batas komunikasi keagamaan menuju paradigma sosial yang inklusif. Pendekatan ini penting karena dakwah tidak hanya menyampaikan pesan moral, tetapi juga menggerakkan struktur sosial menuju tatanan keadilan dan partisipasi. Studi terkini menunjukkan bahwa reinterpretasi dakwah yang menggabungkan antropologi, sosiologi, dan studi kebijakan publik mampu menciptakan pola faith-based social engagement (Paraswati & Ulya Faza Adilah, 2025). Melalui pendekatan ini, pesan dakwah tidak berhenti pada retorika spiritual, tetapi diterjemahkan menjadi tindakan nyata dalam pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, reinterpretasi dakwah menjadi

langkah epistemologis penting untuk mengembalikan fungsi sosial Islam sebagai agen perubahan yang adaptif terhadap realitas global dan digital.

Temuan lapangan memperlihatkan adanya dislocation yaitu keterputusan antara lembaga dakwah dan konteks sosial umat. Keterputusan ini muncul karena dakwah struktural cenderung berorientasi pada regulasi dan program administratif, bukan pada pemaknaan sosial masyarakat. Penelitian Agusman et al. (Agusman dkk., 2023b) menemukan bahwa program dakwah pemerintah daerah di Indonesia sering gagal menjangkau komunitas marginal karena minimnya pendekatan partisipatif dan pemahaman terhadap kultur lokal. Demikian pula, lembaga zakat nasional sering kehilangan konteks pemberdayaan ketika fokus pada distribusi finansial semata tanpa membangun social capital (Makmur dkk., 2024). Dislokasi ini menunjukkan bahwa tanpa pemulihan hubungan antara nilai budaya, struktur sosial, dan pengalaman komunitas, dakwah akan terus kehilangan relevansi sosial dan moralnya dalam masyarakat modern.

Salah satu implikasi serius dari fragmentasi dakwah adalah deauthorization, yaitu melemahnya otoritas sosial dan moral para da'i di tengah masyarakat modern. Dalam era digital dan birokratisasi agama, otoritas keagamaan tidak lagi dimonopoli oleh lembaga formal, tetapi tersebar melalui media sosial dan jaringan komunitas. Menurut penelitian Nuriana & Salwa (Nuriana & Salwa, 2024), munculnya digital da'wah influencers menyebabkan otoritas keagamaan bergeser dari ulama tradisional ke figur-figur populer yang belum tentu memiliki basis epistemik yang kuat. Sementara itu, lembaga dakwah formal justru mengalami delegitimasi karena dianggap tidak responsif terhadap kebutuhan sosial dan isu-isu kontemporer (Wali & Zen, 2023). Fenomena deauthorization ini menegaskan perlunya revitalisasi peran da'i sebagai moral-social mediator yang mampu menghubungkan nilai spiritual dengan problem sosial secara komunikatif dan partisipatif.

Dalam konteks global, berbagai penelitian memperlihatkan bahwa integrasi antara dakwah, pembangunan sosial, dan kebijakan publik telah berhasil dilakukan dalam model faith-based community development. Model ini relevan untuk dibandingkan karena menunjukkan bagaimana lembaga keagamaan dapat menjadi aktor pembangunan sosial yang kredibel. Studi di Inggris dan Malaysia memperlihatkan bahwa masjid dan lembaga zakat berhasil berperan sebagai pusat social inclusion dan community resilience melalui kolaborasi lintas sektor (Wehling dkk., 2024). Pendekatan ini menegaskan bahwa nilai-nilai keagamaan dapat menjadi sumber inovasi sosial dan ketahanan komunitas. Perbandingan ini memberikan pelajaran penting bagi dunia Islam, bahwa integrasi dakwah dan pembangunan sosial memerlukan sinergi antara kultural, struktural, dan teknologi, bukan sekadar reformasi simbolik.

Berdasarkan temuan dan analisis di atas, penelitian ini merekomendasikan formulasi "Integrative Da'wah Framework" sebagai panduan aksi bagi revitalisasi dakwah di era digital. Rencana aksi ini menekankan perlunya transformasi epistemologis dari dakwah yang bersifat instruktif menjadi dakwah yang partisipatif, reflektif, dan berbasis komunitas. Implementasi dapat dimulai melalui

tiga strategi: (1) Cultural grounding; penguatan basis budaya lokal dalam dakwah, (2) Structural synergy ; kolaborasi antara lembaga keagamaan dan kebijakan publik, dan (3) Digital inclusion; pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses dan partisipasi masyarakat (Wehling dkk., 2024). Dengan strategi ini, dakwah tidak hanya menjadi kegiatan ritual, tetapi juga kerangka transformasi sosial Islam yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus mengembalikan makna spiritual yang autentik dan inklusif.

The Need for Da'wah Integration

Hasil penelitian menegaskan pentingnya integrasi antara nilai spiritual Islam, dimensi budaya lokal, dan kebijakan sosial sebagai fondasi paradigma dakwah baru yang responsif terhadap kompleksitas masyarakat kontemporer. Ketiga dimensi tersebut selama ini berjalan secara terpisah spiritualitas berada dalam ruang ritual, budaya dikonstruksi sebagai identitas lokal, dan kebijakan sosial dikelola secara birokratis sehingga menimbulkan fragmentasi praksis dakwah. Studi lapangan pada lembaga zakat, pesantren, dan organisasi masyarakat Islam menunjukkan bahwa upaya dakwah yang menggabungkan spiritual engagement, cultural resilience, dan kebijakan partisipatif menghasilkan dampak sosial yang lebih berkelanjutan (Sutomo dkk., 2024). Dengan demikian, paradigma dakwah integratif diperlukan untuk merekonstruksi posisi Islam sebagai kekuatan sosial yang menumbuhkan kesejahteraan spiritual dan sosial secara simultan.

Penelitian ini mereinterpretasi dakwah sebagai transdisciplinary synthesis antara iman, budaya, dan kebijakan publik. Reinterpretasi ini didasarkan pada keyakinan bahwa dakwah bukan hanya aktivitas religius, tetapi juga sistem praksis sosial yang mengelola nilai-nilai Islam dalam kebijakan kesejahteraan publik. Ilaina et al. (Ilaina dkk., 2022) menegaskan bahwa integrasi epistemik lintas disiplin merupakan pendekatan paling efektif dalam memahami transformasi sosial keagamaan. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa reinterpretasi dakwah melalui kerangka community-based religious communication memperkuat kohesi sosial dan keberlanjutan nilai spiritual di tingkat komunitas (Wajdi, 2024). Dengan demikian, reinterpretasi ini bukan sekadar memperluas makna dakwah, tetapi juga menegaskan urgensi membangun transdisciplinary paradigm yang menghubungkan etika Islam dengan teori pembangunan sosial.

Salah satu kendala utama dalam mengintegrasikan nilai spiritual dan kebijakan sosial adalah fenomena dislocation antara idealisme dakwah dan praksis kebijakan publik. Banyak lembaga dakwah dan institusi sosial Islam gagal mentransformasikan nilai-nilai normatif menjadi kebijakan konkret karena minimnya dialog antara ulama, birokrat, dan masyarakat. Menurut Munir (Munir, 2021), program dakwah pemerintah sering bersifat seremonial tanpa dampak sosial yang mendalam karena tidak didasarkan pada partisipasi masyarakat akar rumput. Dislokasi ini menunjukkan bahwa tantangan utama dakwah bukan hanya pada konten pesan, tetapi juga pada mekanisme penerjemahan nilai spiritual menjadi kebijakan sosial yang operasional dan inklusif.

Dalam konteks modern, deauthorization menjadi problem serius yang melemahkan legitimasi lembaga dakwah sebagai otoritas moral dan sosial. Otoritas keagamaan kini bersaing dengan otoritas digital dan politik, yang sering menggeser makna dakwah menjadi sekadar instrumen simbolik. Dahlan et al. (Dahlan dkk., 2025) menemukan bahwa pergeseran otoritas dari ulama ke digital preachers mengubah pola komunikasi keagamaan dari dialog etis menjadi komodifikasi pesan moral. Lembaga dakwah formal kehilangan pengaruh karena tidak mampu mengartikulasikan relevansi spiritual dalam konteks sosial yang berubah cepat (Solihin & Bukhori, 2022). Oleh karena itu, rekonstruksi paradigma dakwah perlu dimulai dengan re-legitimasi otoritas spiritual yang tidak berbasis kekuasaan, tetapi berbasis partisipasi, akuntabilitas, dan kemampuan membaca kebutuhan sosial masyarakat modern.

Perbandingan dengan studi global memperlihatkan bahwa integrasi antara nilai iman, budaya, dan kebijakan publik telah berhasil diimplementasikan dalam model faith-based community development di beberapa negara. Model ini relevan karena menunjukkan bagaimana lembaga keagamaan dapat berperan sebagai katalis kebijakan sosial tanpa kehilangan spiritualitasnya. Studi Ismail dkk (Ismail dkk., 2024) tentang faith-based social enterprises di Malaysia dan Inggris menunjukkan bahwa kolaborasi antara masjid, lembaga sosial, dan pemerintah berhasil membangun solidaritas sosial dan resiliensi komunitas. Sementara itu, penelitian Adiyono dkk (Adiyono dkk., 2025) membuktikan bahwa keberhasilan model integratif sangat bergantung pada transdisciplinary learning antara aktor agama dan aktor kebijakan. Perbandingan ini menegaskan bahwa dakwah integratif tidak hanya memungkinkan, tetapi juga menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat peran Islam dalam pembangunan sosial yang etis dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis perbandingan, penelitian ini merekomendasikan pembentukan “Integrative Da’wah Framework” sebagai rencana aksi strategis untuk rekonstruksi dakwah di era digital dan sosial modern. Kerangka ini memadukan tiga poros: (1) Spiritual Core; pembaruan nilai-nilai Islam yang kontekstual dan humanistik, (2) Cultural Bridge; penguatan komunikasi lintas budaya dan lokalitas, dan (3) Policy Linkage; integrasi nilai Islam dalam kebijakan sosial partisipatif.

Pendekatan ini sejalan dengan gagasan religious social capital yang dikemukakan oleh (Sulasmi & Agussani, 2021) dan model inclusive da’wah governance dari Maselko et al. (Maselko dkk., 2011). Kedua studi tersebut menegaskan bahwa dakwah yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat mampu memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan legitimasi publik terhadap Islam. Dengan implementasi model ini, dakwah dapat berevolusi menjadi transformative faith practice yang menyeimbangkan spiritualitas, kebijakan, dan kebudayaan menjadikan Islam relevan, inklusif, dan solutif di tengah perubahan global.

Multi-Actor Collaboration in Integrative Da’wah

Hasil penelitian menegaskan bahwa keberhasilan dakwah integratif berbasis community development sangat ditentukan oleh kolaborasi empat aktor utama: ulama, komunitas, pemerintah, dan akademisi. Keempat aktor ini mewakili ranah spiritual, sosial, struktural, dan epistemik yang harus bersinergi dalam satu ekosistem transdisipliner agar dakwah berfungsi sebagai kekuatan transformasi sosial. Studi ini menemukan bahwa program pemberdayaan masyarakat berbasis masjid dan pesantren yang melibatkan akademisi dan pemerintah daerah lebih berkelanjutan dibanding yang hanya bersifat kultural-ritual (Egidiasafitri & Kuswana, 2021). Ulama berperan sebagai penjaga nilai, komunitas sebagai pelaksana aksi sosial, pemerintah sebagai penyedia kebijakan, dan akademisi sebagai pengembang pengetahuan. Dengan demikian, dakwah integratif membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melampaui batas sektoral, mengubah peran dakwah dari aktivitas individual menjadi praktik sosial transformatif lintas aktor.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik dakwah kontemporer berada dalam kondisi fragmentasi kronis yang ditandai oleh keterpisahan antara dimensi spiritual-kultural dan struktur kelembagaan. Dakwah kultural berjalan pada level nilai dan spiritualitas lokal, sementara dakwah struktural beroperasi dalam kerangka regulasi dan birokrasi. Keduanya sering bergerak tanpa dialog, sehingga melahirkan ketimpangan epistemologis yang melemahkan peran dakwah sebagai kekuatan sosial transformatif. Fragmentasi ini turut menciptakan *dislocation*, yakni keterputusan antara lembaga dakwah dan konteks sosial umat, terutama ketika kebijakan dan program keagamaan tidak berbasis partisipasi ataupun pemahaman budaya lokal.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa salah satu dampak paling serius dari fragmentasi tersebut adalah *deauthorization*, yaitu melemahnya otoritas moral dan sosial para da'i. Pergeseran otoritas dari ulama tradisional menuju figur digital, serta delegitimasi lembaga dakwah yang dianggap tidak adaptif terhadap isu kontemporer, menunjukkan adanya krisis otoritas dalam ekosistem dakwah modern. Krisis ini mengimplikasikan perlunya reposisi da'i sebagai mediator moral-sosial yang mampu berkomunikasi secara lebih responsif, partisipatif, dan relevan dengan kebutuhan komunitas.

Berdasarkan kajian perbandingan global, penelitian ini menemukan bahwa integrasi antara nilai iman, budaya lokal, dan kebijakan publik merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan model dakwah yang berorientasi pada pembangunan sosial. Model *faith-based community development* di berbagai negara mengonfirmasi bahwa dakwah dapat menjadi katalis ketahanan komunitas dan inovasi sosial apabila melibatkan kolaborasi lintas aktor serta berbasis pada nilai spiritual yang kontekstual. Secara konseptual dan praktis, penelitian ini menegaskan urgensi membangun paradigma dakwah transdisipliner. Dakwah harus dipahami sebagai sintesis antara spiritualitas Islam, ketahanan budaya, dan kebijakan sosial yang partisipatif. Reinterpretasi dakwah sebagai praksis sosial

terintegrasi memungkinkan dakwah mentransformasikan nilai normatif menjadi aksi nyata dalam pendidikan, ekonomi, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, dakwah tidak lagi terbatas pada penyampaian pesan moral, tetapi menjadi sistem nilai yang menggerakkan masyarakat menuju tatanan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil penelitian, dirumuskan Integrative Da'wah Framework sebagai rekomendasi strategis untuk revitalisasi dakwah di era digital. Kerangka ini dibangun atas tiga poros utama: (1) Spiritual Core, yakni pembaruan nilai Islam yang kontekstual dan humanistik; (2) Cultural Bridge, yaitu penguatan komunikasi dan pemberdayaan berdasarkan kultur lokal; dan (3) Policy Linkage, yaitu integrasi nilai Islam dalam kebijakan sosial yang kolaboratif dan berbasis partisipasi publik. Implementasi kerangka ini menuntut keterlibatan empat aktor kunci ulama, komunitas, pemerintah, dan akademisi—yang berperan sebagai ekosistem transdisipliner dalam mendorong dakwah sebagai kekuatan perubahan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyono, A., Ni'am, S., & Akhyak, A. (2024). Methodology of Islamic Studies: Islam as Religion (A Perspective Epistemology, Paradigm, and Methodology). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 24(1), 169–200. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v24i1.22636>
- Adiyono, A., Nurhayati, S., Islam, M. S., Al-Badawi, H., Sain, Z. H., Wafi, H. A., & Vargheese, K. J. (2025). A Transdisciplinary Approach to Character Development: Islamic Teachings and Pancasila Values in Shaping Global and Faithful Students. *Indonesian Journal on Learning and Advanced Education (IJOLAE)*, 198–217. <https://doi.org/10.23917/ijolae.v7i1.24017>
- Agusman, Majid, Z. A., Hamid, A., & Hanif, M. (2023a). Problematika dakwah dan pendidikan pada masyarakat pedalaman Tau Taa Wana Morowali Utara. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(2), 245–272. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v16i2.14472>
- Agusman, Majid, Z. A., Hamid, A., & Hanif, M. (2023b). Problematika dakwah dan pendidikan pada masyarakat pedalaman Tau Taa Wana Morowali Utara. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(2), 245–272. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v16i2.14472>
- Aprilia Susilawati, Imam Wijaya Kusuma, Muhammad Nurzen, & Agus Rifki Ridwan. (2024). Islam Kultural dan Islam Struktural. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 296–303. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i1.884>
- Birt, L., Scott, S., Cavers, D., Campbell, C., & Walter, F. (2016). Member Checking: A Tool to Enhance Trustworthiness or Merely a Nod to Validation? *Qualitative Health Research*, 26(13), 1802–1811. <https://doi.org/10.1177/1049732316654870>
- Byrne, D. (2022). A worked example of Braun and Clarke's approach to reflexive thematic analysis. *Quality & Quantity*, 56(3), 1391–1412. <https://doi.org/10.1007/s1135-021-01182-y>

- Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The Use of Triangulation in Qualitative Research. *Oncology Nursing Forum*, 41(5), 545–547. <https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>
- Dahlan, Z., Tanjung, M., Asari, H., & Wibowo, B. S. (2025). CELEBRITY ULAMA': Opportunities for the commodification of religion and the values of Islamic education Das'ad Latif. *Cogent Arts & Humanities*, 12(1), 2492427. <https://doi.org/10.1080/23311983.2025.2492427>
- DiCicco-Bloom, B., & Crabtree, B. F. (2006). The qualitative research interview. *Medical Education*, 40(4), 314–321. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2929.2006.02418.x>
- Egidiasafitri, E., & Kuswana, D. (2021). Pengelolaan Masjid Berbasis Kampus dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 6(2), 175–190. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v6i2.33820>
- Flick, U. (Ed.). (2022). *The SAGE handbook of qualitative research design*. SAGE Publications.
- Ghozali, A., & Annisa, Y. (2022). Da'wah in community development: Analysis of community development methods in the Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 42(2).
- Hanif, A., Syarifudin, E., & Muhtarom, A. (2025). Integration Of Religious Moderation In Islamic Education: Challenges And Opportunities In The Digital Era. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(01), 49–66. <https://doi.org/10.30868/ei.v14i01.7767>
- Hollweck, T. (2015). Robert K. Yin. (2014). *Case Study Research Design and Methods (5th ed.)*. *Canadian Journal of Program Evaluation*, 30(1), 108–110. <https://doi.org/10.3138/cjpe.30.1.108>
- Ilaina, R., Ahid, N., & Presetiyo, A. E. (2022). Epistemology of Interdisciplinary Research at Islamic Study on State Islamic Religious Higher Education in Indonesia. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 8(1), 1–20. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i1.4950>
- Irpan, I. (2022). The Objectives of Islamic Education In The Perspective of The Tabligh Congregation In Indonesia. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(02). <https://doi.org/10.30868/ei.v11i02.3200>
- Ismail, Z., Hashim, R., Mohd Aminudin, Z., Saidon, J., & Zainudin, A. Z. (2024a). Innovative Mosque Management Activities for Income Generation and Community Inclusion. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 9(S119), 131–136. <https://doi.org/10.21834/e-bpj.v9iS119.5754>
- Ismail, Z., Hashim, R., Mohd Aminudin, Z., Saidon, J., & Zainudin, A. Z. (2024b). Innovative Mosque Management Activities for Income Generation and Community Inclusion. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 9(S119), 131–136. <https://doi.org/10.21834/e-bpj.v9iS119.5754>
- Jauhari, M., Maghfiroh, E., & Hayyan Najikh, A. (2023). Digital preaching activity: A critical perspective of the public relations. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 8(1), 46–54. <https://doi.org/10.22515/shahih.v8i1.5844>

- Kristiansen, L., Lif, U., & Asklund, H. (2017). Experiences on Participation in Literary Activities: Intellectual Stimuli Empower People with Mental Health Problems. *Open Journal of Nursing*, 07(11), 1307–1323. <https://doi.org/10.4236/ojn.2017.711094>
- Lietz, C. A., Langer, C. L., & Furman, R. (2006a). Establishing Trustworthiness in Qualitative Research in Social Work: Implications from a Study Regarding Spirituality. *Qualitative Social Work*, 5(4), 441–458. <https://doi.org/10.1177/1473325006070288>
- Lietz, C. A., Langer, C. L., & Furman, R. (2006b). Establishing Trustworthiness in Qualitative Research in Social Work: Implications from a Study Regarding Spirituality. *Qualitative Social Work*, 5(4), 441–458. <https://doi.org/10.1177/1473325006070288>
- Makmur, I., Dewi Rosanti, & Khaerunnisa Tri Darmaningrum. (2024a). Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial. *ASKETIK*, 7(2), 228–251. <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1166>
- Makmur, I., Dewi Rosanti, & Khaerunnisa Tri Darmaningrum. (2024b). Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial. *ASKETIK*, 7(2), 228–251. <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1166>
- Maselko, J., Hughes, C., & Cheney, R. (2011). Religious social capital: Its measurement and utility in the study of the social determinants of health. *Social Science & Medicine*, 73(5), 759–767. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.06.019>
- Mr, M. I. F., Anam, A. M., Agustinova, D. A., Prasastiawati, D., Awal, F. R. N., & Yaacob, N. H. (2024). Community-based Islamic education: Democratizing learning through local wisdom. *Jurnal Ilmiah WUNY*, 6(2), 1–13. <https://doi.org/10.21831/jwuny.v6i2.76362>
- Munir, M. (2021). Community Participation in Efforts to Develop Islamic Religious Education. *JIE (Journal of Islamic Education)*, 6(2), 110. <https://doi.org/10.52615/jie.v6i2.213>
- Muttaqin, Z., & Arifah, C. Z. (2025). Kontribusi Dana Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap SDGS di Bidang Pangan, Pendidikan, dan Sanitasi: Studi di Pondok Pesantren Al-Maun Bina Akhlaq Mulia Yogyakarta Kreatif Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Industrial and Syariah Economics*, 2(2), 121–134. <https://doi.org/10.63321/jise.v2i2.83>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1609406917733847. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Nugrahani, T. S., Suharni, S., & Saptatiningsih, R. I. (2019). Potential of Social Capital and Community Participation in Village Development. *JEJAK*, 12(1), 68–85. <https://doi.org/10.15294/jejak.v12i1.15775>

- Nuriana, Z. I., & Salwa, N. (2024). Digital Da'wah in the Age of Algorithm: A Narrative Review of Communication, Moderation, and Inclusion. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 2(4), 242–256. <https://doi.org/10.61194/ijis.v2i4.706>
- Octalia, E. (2020). DAKWAH KULTURAL: RELASI ISLAM DAN BUDAYA LOKAL. *Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 3(2), 179. https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v3i2.1548
- Paraswati, V., & Ulya Faza Adilah, S. (2025). The Role of Philanthropic Communication in Transformative Da'wah. *Ath-Thariq: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 9(1), 30–42. <https://doi.org/10.32332/ath-thariq.v9i1.46tfcz71>
- Pohl, C., Truffer, B., & Hirsch-Hadorn, G. (2017). Addressing Wicked Problems through Transdisciplinary Research. Dalam R. Frodeman (Ed.), *The Oxford Handbook of Interdisciplinarity* (2 ed., hlm. 319–331). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhdb/9780198733522.013.26>
- Scholz, R. W., Zscheischler, J., Köckler, H., Czichos, R., Hofmann, K.-M., & Sindermann, C. (2024). Transdisciplinary knowledge integration – PART I: Theoretical foundations and an organizational structure. *Technological Forecasting and Social Change*, 202, 123281. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123281>
- Shaliha, F. & Soiman. (2025). Representation of Islamic Values in Podcast Login (Content Analysis of Philipp Mayring's Model). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 25(1), 121–154. <https://doi.org/10.24042/mrorqb59>
- Siregar, A. A. (2025). Cultural Da'wah Strategies In Religious Tourism: A Symbolic Interactionist Analysis At The Pilgrimage Site Of Sunan Kalijaga. *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)*, 10(1), 471–484. <https://doi.org/10.18326/inject.v10i1.4322>
- Solihin, S., & Bukhori, B. (2022). The Urgency of Religious Institutions in the Middle of the Localization Complex in Bandung. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v5i1.13812>
- Sulasmu, E., & Agussani, A. (2021). Effect of religious teachings on social capital in Malaysia. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 77(4). <https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.6665>
- Sutomo, S., Musnandar, A., Alzitawi, D. U. D. M., & Sutrisno, S. (2024). Religious-Sociocultural Networks and Social Capital Enhancement in Pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 137–148. <https://doi.org/10.15575/jpi.v10i1.19997>
- Syamsurrijal, M., Nurmandi, A., Jubba, H., Hidayati, M., & Hariyanto, B. (2022). De-authorization of Religion during Covid-19 Pandemic: How the Government Policies and Religious Leaders Reduced Islamic Religious in Indonesia. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 6(3), 341–352. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v6i3.16789>
- 'Ulyan, M. (2023). Digital Da'wah and Religious Authority: A Narrative Review of Islamic Preaching in the Social Media Era. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 1(3), 100–113. <https://doi.org/10.61194/ijis.v1i3.591>

- Wajdi, M. B. N. (2024). Pendampingan Masyarakat Desa dalam Meningkatkan Moderasi Beragama Dan Memupuk Kepedulian. *Bisma : Bimbingan Swadaya Masyarakat*, 6(1), 204–214. <https://doi.org/10.59689/bisma.v3i4.775>
- Wali, A. M. N., & Zen, M. Z. (2023). Tantangan Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Era Teknologi Informasi: Formulasi Materi di Youtube. *Hikmah*, 17(2), 201–218. <https://doi.org/10.24952/hik.v17i2.8100>
- Wehling, H., Weston, D., Hall, C., Mills, F., Amlôt, R., Dennis, A., Forbes, L., Armes, J., Mohamed, M., Buckley, S., Dar, O. A., Mohamed, A., Wurie, F., Shafi, S., Zumla, S. A., & Ala, A. (2024). Use of UK faith Centre as a COVID-19 community vaccination clinic: Exploring a potential model for community-based health care delivery. *Postgraduate Medical Journal*, 100(1188), 751–759. <https://doi.org/10.1093/postmj/qgae028>
- Zain, A., Yusuf, M., & Fuadi, M. (2017). INTERNALISASI NILAI-NILAI MODERNITAS DALAM GERAKAN DAKWAH ORGANISASI MUHAMMADIYAH DI ACEH. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, 1(1), 17. <https://doi.org/10.22373/al-idarah.v1i1.1541>
- Zaini, A. (2017). Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan. *JURNAL ILMU DAKWAH*, 37.